

35 UMKM Dibantu Pemasaran

GROBOGAN (KR) - Adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu dampaknya sangat dirasakan oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Grobogan. Salah satunya adalah pelaku UKM yang membuat produk pangan lokal binaan dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat.

"Selama pandemi, banyak UKM kesulitan memasarkan produknya. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar UKM terpuruk karena pendapatannya turun drastis. Untuk itu kami berusaha membantu para UKM yang ada," ungkap Kepala DKP Grobogan Dr Sunanto SP, Jumat (4/6).

Ada 35 UKM binaan DKP yang memproduksi 75 macam makanan olahan. Dalam usaha membantu pemasaran, pihaknya meluncurkan program jaringan pemasaran ketahanan pangan atau yang disingkat Jaran Kepang. Dalam pembentukan jaringan pemasaran ketahanan pangan ini, pihaknya bekerja sama dengan Sampoerna Ritel Community (SRC) Grobogan.

"SRC ini punya jaringan sekitar 600 toko. Jadi, nantinya produk dari UKM itu akan kita tempatkan di toko-toko jaringan SRC. Untuk membantu pemasaran UKM, kita juga menggandeng dua sekolah. Yakni SMKN 1 Wirosari, dan SMKN 1 Purwodadi. Kedua sekolah ini ketebulan memiliki minimarket yang dikelola sendiri. Nantinya, produk dari UKM itu kita tempatkan juga di sana. Dengan upaya ini, kita harapkan, penjualan produk UKM itu bisa terangkat," jelas Sunanto. (Tas)-f

Warga Khawatir Kasus Covid-19

PATI (KR) - Bupati Pati Haryanto SH MM MSI mengaku sudah menyiapkan kebutuhan ruang perawatan, sebagai antisipasi peningkatan pasien Covid-19 asal Pati maupun luar daerah. Skenario awal, penambahan pasien akan ditempatkan di RS Kayen, RS Soewondo dan rumah sakit yang lain.

"Saat ini ada 187 pasien, termasuk pasien rujukan dari luar daerah. Semua direktur rumahsakit di Pati untuk senantiasa memantau dan mengawasi secara detail situasi dan kondisi. Karena, jumlah kematian Covid-19 juga tidak sedikit," ujarnya.

"Saat ini ada ruang isolasi 64. Namun keadaan terus mengkhawatirkan. Maka setiap rumahsakit segera disiapkan penambahan ruangnya" tambah Bupati Pati.

Sejumlah warga Pati mulai mencemaskan keadaan pandemi Covid-19 yang dalam sepekan terakhir ini, cenderung meningkat jumlah korbannya. Mereka khawatir kasus di Kudus akan melesar sampai ke wilayah Pati. Korban meninggal dunia dengan pemakaian protokol Covid-19 di Pati, pada hari Jumat (4/6) tercatat 3 orang. Sedangkan sehari sebelumnya (Kamis), tercatat 7 orang. Akibat merebaknya pandemi di awal Juni, memaksa sejumlah tempat wisata ditutup. Seperti dua waduk di kecamatan Gembong, dan kebun wisata Jollong. (Cuk)-f

Pulihkan Sambungan hal 1

Selain itu Indonesia juga memastikan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati harus bersifat secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional.

Siti menjelaskan restorasi ekosistem itu dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas ekosistem hutan dan lahan yang terdegradasi. Restorasi ekosistem juga dilakukan melalui bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, salah satu bentuk pengelolaan hutan bekas tebangan. "Restorasi ekosistem dimaksudkan mengembalikan ekosistem hutan terdegradasi setelah dikelola dengan sistem tebang pilih dan tanam Indonesia, kepada kondisi yang semaksimal mungkin mendekati kedekatan semula atau sebelum dieksploitasi," ujarnya.

Perubahan paradigma pengelolaan hutan juga terjadi dari yang berorientasi penghasil kayu menjadi pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Saat ini terdapat 16 unit manajemen restorasi ekosistem di hutan produksi dengan luas area 622.861 ha. Unit itu terdapat di berbagai ekosistem.

Menteri LHK juga mengatakan implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai bebas emisi harus dilakukan dengan langkah-langkah realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. "Yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima tahunan selanjutnya, Indonesia secara realistis terus menerus mempelajari dan dengan berbagai pengalaman," katanya.

Siti menegaskan hingga saat ini terus diupayakan untuk dapat dicapai Indonesia hijau tanpa emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Dia memastikan pemerintah terus bekerja untuk memikirkan dan memproyeksikan secara serius langkah-langkah yang bisa terimplementasi.

Hal itu terkait erat dengan kebutuhan pembangunan yang ditopang oleh sektor energi dan dalam hal investasi teknologi serta pembiayaan yang tidak sedikit. Selain itu harus dipertimbangkan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan listrik yang mencakup 46 persen dari sektor energi, sebuah sektor yang penting dalam upaya pengurangan emisi Indonesia. "Jadi bukan hanya asal tidak boleh ada emisi, tidak seperti itu. Kita akan lakukan secara realistis dengan pertimbangan pembangunan dan kebutuhan bagi masyarakat," ujar Siti. (Ant)-f

Mulai Sambungan hal 1

Sementara itu, meski penegakan prokes dan edukasi terus digencarkan Pemda DIY, masih ditemukan banyak warga yang melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut menjadi tantangan semua pihak agar penegakan prokes bisa menjadi bagian dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena hanya dengan penegakan prokes, penularan kasus atau adanya klaster baru bisa dicegah.

"Sejumlah strategi sudah kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan prokes, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Buktinya pada Jumat (4/6) kami masih menemukan 130 pelanggaran berkaitan dengan penegakan prokes. Adapun untuk perinciannya sebanyak 68 orang tidak memakai masker 33 orang dan 29 orang tidak memakai masker secara benar," kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmat di Yogyakarta, Sabtu (5/6).

Noviar menyatakan, selain mengencarkan razia masker dan pengawasan, pihaknya juga meminta masyarakat selalu menerapkan 5 M. Karena, selain jumlah kasus yang masih fluktuatif, ada kecenderungan masyarakat mulai abai. Hal itu terjadi karena ada yang beranggapan setelah mendapatkan vaksin mereka bisa bebas dari Covid-19. Padahal vaksin hanya salah satu upaya pencegahan jadi penegakan prokes tetap menjadi keharusan. (Cuk/Cry/Ria/Ira)-f

Komisi X DPR Dukung Pengembangan Desa Wisata

WONOSOBO (KR) - Komisi X DPR RI mendukung penuh konsep pengembangan desa-desa wisata di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, terutama pengembangan kawasan wisata Dieng yang telah masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Termasuk pengembangan 'Kawasan 5 Dieng Baru' yang menjadi program prioritas (Pemkab Wonosobo).

Hal tersebut muncat dalam kunjungan kerja (Kunker) Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Tim Kunker Agustina Wilujeng Pramestuti, bersama Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih beserta rombongan Komisi X di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan Kunker dipusatkan di Gedung Syailendra Taman Syailendra Dieng, Jumat (4/6) sore.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Wonosobo Aff Nurhidayat bersama Wakil Bupati Muhammad Albar, Ketua DPRD Eko Prasetyo, Sekda One Andang Wardoyo, dan jajaran Forkompimda, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo Agus Wibowo, serta para pelaku wisata yang ada di daerah.

Menurut Agustina Wilujeng, kondisi desa-desa wisata di Wonosobo masih kurang tergarap dengan baik. Banyak infrastruktur terutama akses jalan belum memadai. Padahal desa-desa tersebut memiliki potensi wisata, terutama sumber daya alam yang sangat menawan. "Jadi yang terpenting itu akses jalan yang baik. Jika akses jalan sudah baik, maka

otomatis kunjungan wisata akan tinggi dan banyak investor yang berdatangan," paparnya.

Terkait hal itu, lanjut Agustina, Komisi X meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar terlibat dalam pengembangan wisata daerah, terutama dukungan terhadap infrastruktur akses jalan yang memadai. Jika akses jalan sudah baik, maka pemerintah daerah tinggal mengelola dan mengembangkan potensi destinasi-destinasi wisata yang ada.

Bupati Wonosobo Aff Nurhidayat, membenarkan bahwa kunci utama dalam pengembangan kawasan wisata Dieng dan sekitarnya adalah aksesibilitas menyangkut jalan dan sarana prasarana pendukung lainnya. Untuk itu, pihaknya akan berjuang agar pemerintah pusat melakukan intervensi terhadap pengembangan wisata di daerah. Apalagi kawasan wisata Dieng telah masuk dalam kawasan strategis nasional, sehingga harus ada bentuk intervensi dari pemerintah pusat terutama dalam hal membantu ketersediaan infrastruktur akses jalan yang memadai.



KR-Ariswanto

Ketua Tim Kunker Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih beserta rombongan ketika meninjau produk UMKM di Wonosobo.

Sejauh ini, lanjut Affif, pengembangan kawasan wisata Dieng terus dilakukan Pemkab Wonosobo. Termasuk pengembangan desa-desa wisata melalui konsep pengembangan 'Kawasan 5 Dieng Baru' yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Diproyeksi keberadaan Kawasan 5 Dieng Baru tersebut nantinya mampu menjadi sektor penggerak dan pengungkit sektor pariwisata, baik di Kabupaten Wonosobo maupun skala Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Diharapkan, Kawasan 5 Dieng Baru ini akan menambah daya tarik pariwisata di Kabupaten Wonosobo, sehingga sektor pari-

wisata Wonosobo dapat bangkit kembali. Termasuk membantu para pelaku usaha pariwisata dalam menata kembali kestabilan ekonominya yang sempat terpukul akibat pandemi Covid-19.

"Kawasan 5 Dieng Baru harus terus dikembangkan dan bisa mencerminkan wisata alam dan seni-budaya di Wonosobo. Termasuk desa-desa wisata yang lain, sehingga bisa menjadi penggerak sektor pariwisata di daerah, maupun di tingkat Jawa Tengah dan nasional.

Pengembangan wisata ini sekaligus sebagai penanda kebangkitan dunia wisata di tengah pandemi Covid-19," pungkasnya. (Art)-f

Anggota DPRD Korban Bisnis Fiktif

PURWOKERTO (KR) - Seorang anggota DPRD Banyumas menjadi korban penipuan bisnis fiktif. "Korban mengalami kerugian Rp 743 juta," kata Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Berry, Sabtu (5/6).

Pelaku dalam aksi penipuan berinisial NS warga Pasir Kidul, Purwokerto Barat berhasil ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas.

Berry menjelaskan, dalam aksinya pelaku meyakinkan korban menawarkan bisnis dengan per-

janjian bagi hasil. Kejadian itu berawal ketika korban kenal dengan pelaku pada sekitar bulan September 2020 lalu.

Kepada korban pelaku menawarkan bisnis ekspedisi barang dan jasa dalam negeri dan luar negeri. Dalam bisnis tersebut pelaku menjanjikan bagi hasil setiap bulannya.

Korban yang percaya dengan tawaran pelaku menyerahkan uang modal secara bertahap dari kurun waktu dari 26 September 2020 hingga 26 Mei 2021.

Setidaknya korban sudah me-

nyerahkan uang modal dengan mentransfer ke rekening pelaku dan juga uang tunai dengan total Rp 743.000.000.

Korban juga sempat menerima uang bagi hasil setiap bulannya dari pelaku, mulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Kepada korban, pelaku menjanjikan akan mengembalikan sebagian dari modal pada tanggal 2 Juni 2021.

"Namun saat jatuh tempo pelaku tidak bisa mengembalikan uangnya dan setelah dicek bisnis tersebut ternyata merupakan bis-

nis fiktif," terang Berry.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Banyumas. Untuk pengusutan kasus tersebut penyidik mengamankan pelaku bersama barang bukti berupa satu bendel rekening koran rekening Bank BCA dan buku tabungan Bank BCA atas nama pelaku.

Berkaitan perbuatannya, NS dijerat pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling empat penjara. (Dri)-f

PPKM Mikro Diperpanjang hingga 14 Juni

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo berlakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai 1 sampai dengan 14 Juni. Hal itu sesuai dengan surat edaran (SE) tertanggal 1 Juni 2021 nomor 400/1645/2021 yang ditandatangani Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu (5/6) mengatakan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online dan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan ketentuan, untuk jenjang SD/MI dan PAUD masih melaksanakan

PJJ, untuk jenjang SMP, SMA, SMK dan MA dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat dan bertahap dengan pertimbangan peta risiko daerah, untuk jenjang perguruan tinggi atau akademi dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap.

Dalam rangka persiapan uji coba PTM tahap III pada bulan Juli 2021 diminta pada satuan pendidikan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai protokol kesehatan secara penuh, penguatan komitmen dan perilaku disiplin protokol kesehatan warga satuan pendidikan secara ketat khususnya pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik, pengendalian mobilitas pendidik yang melaksanakan perjalanan lintas wilayah.

Kegiatan restoran, rumah makan dan warung makan atau pedagang kaki lima (PKL) untuk

makan dan minum ditempat sebesar 50 persen dari kapasitas tempat duduk dan tidak boleh melebihi 100 orang. Sedangkan layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata atau taman dengan menerapkan kewajiban penerapan screening test antigen atau GeNose untuk fasilitas berbayar atau lokasi wisata indoor dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat untuk fasilitas umum atau lokasi wisata outdoor. Untuk daerah dengan zona oranye dan zona merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata dan taman dilarang. Apabila terdapat pelanggaran dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan seni sosial dan budaya

yang dapat menimbulkan kerumunan dibuka di zona hijau di tingkat RT, RW, desa dan kelurahan sampai dengan pukul 21.00 WIB maksimal 25 persen dan tidak boleh melebihi 100 orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat antara lain, hajat dilaksanakan dengan tidak makan dan minum di tempat, makanan dibawa pulang serta tidak menyediakan tempat duduk bagi tamu atau sistem banyu mili, seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengadakan kontak fisik dengan tamu atau penonton.

Dinas Pertanian dan Perikanan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sukoharjo agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan atau pasar. (Mam)-f

PENANGANAN KEBOCORAN DATA

Polri Dalam Keterangan Vendor BPJS

JAKARTA (KR) - Polri telah memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan dalam rangka mendalami kasus kebocoran data yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam keterangannya di

Jakarta, Sabtu (5/6), mengatakan, penyidik masih mendalami keterangan yang telah didapatkan dari lima vendor yang menjalani pemeriksaan Rabu lalu (2/6).

"Informasi apa yang didapat penyidik dari vendor-vendor itu akan menjadi sesuatu yang penting dalam proses (penyelidikan) selanjut-

nya," kata Rusdi.

Ia menyebutkan, lima vendor yang diperiksa Rabu lalu, merupakan pihak swasta yang menyediakan informasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada di BPJS. Sebelumnya, Polri telah meminta keterangan empat orang saksi, yakni dua orang

dari BPJS Kesehatan dan dua orang dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Diduga keras terjadi kebocoran, ya kita belum dapat memastikan, ini masih diperiksa terus oleh penyidik tentang hal tersebut, tapi ini diduga keras terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," ujar Rusdi. (Ant)-f

Kebudayaan Sambungan hal 1

rumah rakyat juga menjadi rumah budaya di mana seluruh ekspresi kebudayaan nasional dan pencapaian kebudayaan rakyat Indonesia dibahas, didiskusikan dan ditampilkan di kantor partai," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Megawati, kebudayaan membentuk karakter

sejati suatu bangsa. Atas dasar itu, Bung Karno sebagai Bapak Bangsa selalu bersentuhan dengan banyak seniman dan budayawan. "Bung Karno menggelorakan rasa cinta kepada Tanah Air melalui seni lukisan, seni patung, seni tari dan berbagai ekspresi kebudayaan lain-

nya," katanya.

Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Nuryadi mengatakan, Akara adalah istilah klasik Sansekerta yang berarti wujud atau rupa yang mengejawantah secara merdeka dalam pameran seni rupa. Independensi 78 berupa dalam menangkap api Bung Karno

menunjukkan, gagasan Sang Proklamator tersebut terus menyalah hingga sekarang. Sebelum pameran Akara, DPD PDI Perjuangan DIY juga telah menggelar melukis bersama seniman bertajuk 'Memotret Yogyakarta Kini' pada 17 April 2021 sembari membuka puasa bersama. (Dev)-f

Kebangkitan Sambungan hal 1

desa dan menjadi penggerak ekonomi tingkat desa melalui desa wisata," ujarnya.

Doto Yogantoro mengatakan, Desa Wisata Pentingsari dikenal di mancanegara sebagai salah satu desa

wisata dengan segudang penghargaan. Mulai dari Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) 2017 dalam kategori ekonomi, sampai 100 Top destinasi pariwisata berkelanjutan di dunia versi Global Green Desti-

nations Days (GGDD) 2019.

Desa Wisata Pentingsari memiliki berbagai daya tarik wisata, seperti pertunjukkan seni tari punokawan, permainan musik tradisional gamelan, seni batik, kuliner tempe dan ja-

mur serta produk UMKM berupa kopi. Ada juga aktivitas berupa seni Wayang Suket serta aktifitas unggulan lainnya yang memacu adrenalin berupa pengalaman menaiki Jeep menyusuri sungai. (Dev)-f